

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP,
PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK
(PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**



Diajukan oleh:

**NANDA ADILAH
NPM.21.01.12.0007**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRIDINANTI
2025**

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nurda Adhiah
Nomor Pokok/NIRM : 210120007
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Sarjana
Koncentrasi : Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KIP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG

Pembimbing Skripsi

Tanggal 12-05-2021 Pembimbing I : Yanek Syafitri, SE., M.Si
NIDN. 0225026401

Tanggal 15-05-2021 Pembimbing II : Riza Syaputera, SE, Ak, CA, CPA, MAK
NIDN. 0224100301

Dekan

Tanggal 15-05-2021



Dr. Masy. Mikhial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN: 0205026401

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Tanggal 15-05-2021

Dr. Rosalina Pedria Mayuani, SE, Ak, M.Si
NIDN: 0026028301

108 PS/DFEB/21

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nando Adilah
Nomor Pokok/NIRM : 2101120067
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Pajak
Judul Proposal : PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR, PALEMBANG

Pembimbing Skripsi

Tanggal 15-02-2025

Ketua Penguji : Yanic Syahri, S.E., M.Si
NIDN: 0225026401

Tanggal 15-02-2025

Penguji I : Rick Syahputra, SE, Ak, CA, CPALM, AK
NIDN: 0224108301

Tanggal 15-02-2025

Penguji II : Cresslia Armeren, S.E., M.Si
NIDN: 0226018601

Dekan

Tanggal 15-02-2025



Dr. MGE Mirza, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN: 0205026401

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Tanggal 15-02-2025



Dr. Rosalina Febria Muzanti, SE, Ak, M.Si
NIDN: 0026028301

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar bin Khattab)

"Meminta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang sabar"

(QS. Al-Baqarah, 153)

Kupersembahkan Kepada :

- ◆ Kedua Orang Tua Tercinta**
- ◆ Diri Sendiri Terhebat**
- ◆ Kakak dan Adik Terkasih**
- ◆ Dosen Pembimbing Terhormat**
- ◆ Teman Dan Sahabat Tersayang**
- ◆ Almamaterku, Universitas
Tridinanti**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Adilah

Nomor Pokok/NIM : 2101120007

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ite Timur Palembang", telah ditulis dengan sungguh – sungguh.

Apabila dikemudian hari dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Desember 2024

A yellow rectangular stamp with the text "KPP PRATAMA ITE TIMUR" and "PALEMBANG" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Nanda Adilah

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini ditulis dan disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata I pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti dengan judul **"Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang)"**.

Pada kesempatan ini peneliti banyak mendapatkan dukungan, doa, bimbingan, saran, semangat, motivasi, serta bantuan, maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Edizal, AE., MS selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak. CA. CSRS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Meti Zulyana, S.E., M.Si., Ak. CA. CSRS. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
4. Kusminaini Armin, S.E., M.M. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultasn Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
5. Yancik Syafitri, S.E., M.Si. selaku pembimbing I

6. Riza Syahputera, SE,AK. CA,CPAI,M.AK selaku pembimbing II.
7. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
8. Ayahanda M. Azhar Dan Ibunda Masayu Halimah, terima kasih tak terhingga atas limpahan cinta dan kasih sayang, kesabaran dalam mendidik, memberikan dukungan baik moral maupun materi serta tak pernah berhenti mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudari penulis Adam Alfaridzi, Farhan Idris, Nabila Khairunisa, Haikal Alifian terima kasih karena selalu memberikan support yang tiada henti, yang selalu mengingatkan untuk terus semangat.
10. Umi Anisa yang sudah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan dan doa dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
11. Sepupu tercinta Aliya Khoirinisyah terima kasih atas dukungan dan kelucuan yang membuat penulis senang, sehingga penulis semangat mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
12. Sahabat penulis Ghea Gardena dari bangku SMK sampai perkuliahan selalu membersamai 7 tahun ini yang selalu menemani proses penulis, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa

sehingga dapat terselesaikan skripsi ini, terima kasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit saya.

13. Teman seperjuangan Rika Prianti yang menjadi teman dari kecil hingga sekarang yang tidak pernah berhenti untuk saling suport dan membantu dalam kerumitan dalam menyusun skripsi penulis terima kasih hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu supaya dapat wisuda bersama-sama.

14. Dan terakhir untuk Nanda Adilah, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesnya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini.

Peneliti menyadari bahwa, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti masih membutuhkan saran serta kritik membangun agar lebih baik lagi kedepannya. Dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang, Desember 2024

Peneliti

Nanda Adilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
UNIVERSITAS TRIDINANTI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
RIWAYAT HIDUP	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	11
2.1.2 Pajak	13
2.1.2.1 Pengertian Pajak	13
2.1.2.2 Unsur-Unsur pajak	15
2.1.2.3 Jenis-jenis pajak	15
2.1.2.4 Fungsi Pajak	19
2.1.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	20
2.1.3 Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	21
2.1.3.1 Pengertian NPWP	21
2.1.3.2 Indikator Kewajiban Kepemilikan NPWP	23
2.1.3.3 Fungsi NPWP	23

2.1.3.4	Tata Cara Pendaftaran NPWP	23
2.1.4	Pemeriksaan Pajak	25
2.1.4.1	Indikator Pemeriksaan pajak	25
2.1.4.2	Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak	26
2.1.4.3	Tujuan Pemeriksaan pajak	26
2.1.4.4	Jenis Pemeriksaan Pajak	28
2.1.4.5	Jangka Waktu Pemeriksaan	28
2.1.4.6	Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksaan Pajak	29
2.1.5	Penagihan pajak	33
2.1.5.1	Indikator Penagihan Pajak	33
2.1.5.2	Jenis Penagihan Pajak	33
2.1.5.3	Dasar Penagihan Pajak	35
2.1.5.4	Jadwal Waktu Penagihan Pajak	36
2.1.5.5	Daluwarsa Penagihan Pajak	37
2.1.6	Penerimaan Pajak	37
2.1.6.1	Indikator Penerimaan Pajak	38
2.2	Penelitian Relevan	38
2.3	Kerangka Berfikir	42
2.4	Hipotesis Penelitian	45
2.4.1	2.4.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	45
2.4.2	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak	45
2.4.3	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	46
2.4.4	Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	46
BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1	Tempat Dan Waktu Penelitian	47
3.1.1	Tempat Penelitian	47
3.1.2	Waktu Penelitian	47
3.2	Sumber Data Teknik Pengumpulan Data	47
3.2.1	Sumber Data	47
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	48

3.3	Populasi, Sampel Dan Sampling	49
3.3.1	Populasi	49
3.3.2	Sampel	49
3.3.3	Sampling	50
3.4	Rancangan Penelitian	51
3.5	Variabel Dan Definisi Operasional	52
3.5.1	Variabel	52
3.5.2	Definisi Operasional	52
3.6	Instrumen Penelitian	54
3.7	Teknik Analisis Data	54
3.7.1	Uji Validitas	55
3.7.2	Uji Reliabilitas	55
3.7.3	Uji Persyaratan Analisis	55
3.7.3.1	Uji Asumsi Klasik	55
3.7.4	Uji Simultan (F)	56
3.7.5	Uji Parsial (t)	57
3.7.6	Analisis Regresi Berganda	58
3.7.7	Analisis Koefisien Determinasi	58
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1	Hasil Penelitian	60
4.1.1	Sejarah Singkat KPP Pratama Ilir Timur Palembang	60
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Ilir Timur Palembang	61
4.1.3	Struktur Organisasi KPP Pratama Ilir Timur Palembang	62
4.1.4	Gambaran Umum Responden	65
4.1.5	Hasil Uji Instrumen	66
4.1.5.1	Uji Validitas	66
4.1.5.2	Uji Reliabilitas	70
4.1.6	Uji Normalitas	70
4.1.7	Hasil Uji Analisis Data	71
4.1.7.1	Uji Asumsi Klasik	72
4.1.8	Uji simultan (Uji F)	73

4.1.9 Uji Parsial (Uji t)	75
4.1.10 Uji Koefisien Regresi Linier Berganda	77
4.1.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	79
4.2 Pembahasan	79
4.2.1 Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	80
4.2.2 Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	81
4.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	83
4.2.4 Pengaruh Penagihan Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2023	2
Tabel 2.1	Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak	27
Tabel 2.2	Perbandingan Kewajiban Pemeriksaan Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor	31
Tabel 2.3	Perbandingan Kewenangan Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor	32
Tabel 2.4	Jadwal Waktu Penagihan Pajak	38
Tabel 2.5	Tabel Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1	Variabel dan Definisi Operasional	54
Tabel 3.2	Skala Likert	59
Tabel 4.1	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4.2	Jumlah Responden Berdasarkan Usia	65
Tabel 4.3	Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	66
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Variabel Kewajiban kepemilikan NPWP	67
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak	68
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Penagihan Pajak	69
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak	69
Tabel 4.8	Hasil Uji Realibilitas	70
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas	71
Tabel 4.10	Hasil Uji Analisis Deskriptif	72
Tabel 4.11	Hasil Uji F atau Simultan	74
Tabel 4.12	Hasil Uji T atau Parsial	76
Tabel 4.13	Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda	77
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Ilir Timur Palembang.....	62

ABSTRAK

Nanda Adilah. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. (Di Bawah Bimbingan Pak Yancik Syafitri, SE.,M. Si. dan Pak Riza Syahputera, SE.,AK.,CA.,CPAI.,M.Ak.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak baik secara parsial maupun secara simultan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data primer, data primer berupa penyebaran hasil kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang sebanyak 244.116. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dipilih dengan menggunakan metode Purposive sampling. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan uji Validitas, uji Reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji statistic deskriptif), uji hipotesis (uji F dan uji t), uji regresi berganda dan uji koefisien determinasi (R^2).

Berdasarkan hasil penelitian dengan taraf signifikan 5% yang telah dikemukakan, diketahui bahwa pada kewajiban kepemilikan NPWP tidak berpengaruh secara signifikan, hal ini ditunjukkan pada hasil uji t yaitu $t_{hitung} (0,586 < 1,984)$. Pada pemeriksaan pajak diperoleh $t_{hitung} 3,731$ dan penagihan pajak diperoleh $t_{hitung} 7,238$ dapat disimpulkan bahwa kedua variable tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara simultan pada uji F, didapatkan pada $(49,487 > 2,70)$ artinya bahwa variable kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Kata Kunci : Kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRAK

Nanda Adilah. The Effect of NPWP Ownership Obligation, Tax Audit and Tax Collection on Tax Revenue at KPP Pratama Ilir Timur Palembang. (Under the Guidance of Mr. Yancik Syafitri, SE.,M. Si. and Mr. Riza Syahputera, SE.,AK.,CA.,CPAI.,M.Ak.)

This study aims to determine: The effect of NPWP Ownership Obligation, Tax Audit and Tax Collection both partially and simultaneously on Tax Revenue at KPP Pratama Ilir Timur Palembang. This study uses Quantitative data analysis techniques. The data source used in this study uses primary data analysis techniques, primary data in the form of distributing questionnaire results. The population in this study were individual taxpayers at KPP Pratama Ilir Timur Palembang totaling 244,116. The sample in this study were 100 respondents selected using purposive sampling method. To analyze the data, researchers used Validity test, Reliability test, classical assumption test (normality test and descriptive statistical test), hypothesis testing (F test and t test), multiple regression test and determination coefficient test (R²).

Based on the results of research with a significant level of 5% that has been stated, it is known that the obligation of NPWP ownership does not have a significant effect, this is shown in the t test results, namely tcount (0.586 < 1.984). In the tax audit obtained tcount 3.731 and tax collection obtained tcount 7.238 can be concluded that the two variables have a positive and significant effect on tax revenue. Simultaneously in the F test, obtained at (49.487 > 2.70) means that the variables of NPWP ownership obligations, tax monitoring and tax collection have a significant effect on tax revenue at KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Keywords: Obligation of NPWP ownership, Tax Audit, Tax Collection, Tax Revenue

RIWAYAT HIDUP

Nanda Adilah dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 21 Oktober 2003 dari Ayah M. Azhar dan Ibu Masayu Hallimah Tussakdiah. Saya anak kedua dari lima bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 2 Banyuasin. Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2018 di SMP Bina Warga Palembang, selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2021 di SMK Negeri 1 Palembang. Pada tahun 2021 saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Tridinianti.

Palembang, 17 Januari 2025

Nanda Adilah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia sebenarnya memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat dari kenyataannya sekarang, di Indonesia yang mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor, salah satunya adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang sangat efektif. Hal ini karena pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara (Ariffin dan Tanjung, 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 1 menyebutkan "Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang menjadi hak orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa ganti rugi. Secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". (Mardiasmo, 2023:3) "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam upaya agar memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar memancing kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban dalam membayar pajak.

Langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Semakin banyaknya kewajiban perpajakan yang diisi oleh wajib pajak dengan benar dan tepat, maka penerimaan pajak semakin meningkat. Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh KPP Ilir Timur Palembang.

Tabel 1.1
Target & Realisasi Penerimaan, 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2019	1,011,054,744,000	1,031,682,981,966
2020	946,936,467,000	1,040,159,906,427
2021	1,373,437,027,000	1,414,324,094,620
2022	1,512,263,543,000	1,844,321,561,334
2023	1,891,649,473,000	2,026,214,804,438
Jumlah	6,735,341,254,000	7,356,703,348,785

Sumber: KPP Ilir Timur Palembang, Periode 2019-2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2019 sebesar Rp 1.031.682.981.966 triliun, tahun 2020 Rp 1.040.159.906.427 triliun, tahun 2021 Rp 1.414.324.094.620 triliun, tahun 2022 Rp 1.844.321.561.334

triliun dan tahun 2023 Rp 2.026.214.804.438 triliun. Untuk lebih dalam memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan antara lain pemerintah, pejabat pajak (fiskus), dan Masyarakat yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak (Darne, dkk, 2022).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan system *self assessment system*, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai perundang-undangan Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 2 ayat (1) UU KUP. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut berisi informasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha perpajakan, kewajiban tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Pengisian kewajiban

perpajakan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak..

Direktorat Jenderal Pajak berupaya agar wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Karena semakin banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang dapat digunakannya. Terjadinya kehilangan potensial akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiscal juga dapat diatasi. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, pemerintah telah mengantisipasi dan diimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya kepemilikan NPWP. Pembayaran pajak dapat diketahui dan dikejar dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP. Oleh karena itu dalam UU PPh terbaru, pemerintah melalui Dirjen Pajak berupaya menjangkir wajib pajak agar semakin banyak memiliki NPWP. Jumlah pemilik NPWP tahun 2019 yaitu sebesar 42,5 juta jumlah wajib pajak ini terus bertambah menjadi 46,3 juta pada 2020 dan 62,3 juta pada 2021. Kemudian, angkanya kembali bertambah menjadi 66,2 juta wajib pajak pada 2022, serta mencapai 69,1 juta pada 2023 (DDTCnews, 19/8/2023)

Selain mewajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada masyarakat, pemerintah juga perlu upaya dalam meningkatkan penegakan hukum lain. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan pajak. Proses pemeriksaan

pajak memiliki tujuan pula menurut peraturan Menteri keuangan No.184/PMK.03/2015 sebagaimana berikut:

"pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menjadi sarana yang berperan untuk melakukan pengujian terkait kepatuhan dalam memenuhi upaya kewajiban pajak dan berbagai tujuannya dalam rangka menjalankan dan mengimplementasikan ketetapan peraturan undang-undang terkait pajak."

Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyeludupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan demi memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang lagi perbuatan yang sama kedepannya. Hal ini memerlukan dilakukannya pembinaan serta pengawasan berkesinambung terhadap wajib pajak. Selain itu seringkali wajib pajak sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya maka perlu dilakukan yang namanya pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut system *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan komponen *official assessment*. Surat ketetapan pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang (Nadiani Putri Utami & Ery Setiawan, 2019).

Selain dilakukannya pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan lain

yang bias dilakukan yaitu dengan melakukan penagihan pajak. *Self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan, dimana dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan bisa disalahgunakan. Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang masih belum melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Palupi dkk, 2017).

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita, Penagihan Pajak dapat dilakukan secara pasif dan secara aktif oleh DJP kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perpajakan (Ni Kadek dan Anik, 2019:2)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud adalah :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita". Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang

penagihan pajak tersebut maka diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak dapat termotivasi untuk membayar yang selanjutnya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun, dalam realitasnya, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan besar. Meskipun jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP meningkat setiap tahunnya, tidak semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh. Hal ini terlihat dari masih adanya tunggakan pajak serta tingkat kepatuhan yang belum optimal.

Selain itu, kebijakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sering kali dianggap sebagai instrument pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas kedua kebijakan ini dalam meningkatkan penerimaan pajak masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Data menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum tergalai secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang. Dengan menggunakan beberapa variable yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul:

"Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan pajak (pada kantor pelayanan pajak pratama ilir timur Palembang)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang?
2. Apakah Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
4. Apakah Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak secara parsial

terhadap Penerimaan pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Manfaat bagi peneliti

Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Tridianti Palembang.

3. Manfaat bagi KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil studi ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan kualitas pendidikan universitas selanjutnya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. L. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan Npwp, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Angraini, S. (2021). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta).
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1-17.
- Dira, P. R. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepemilikan Npwp, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Madya Pekanbaru. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tridinanti (2023). *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir*. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama. Palembang: Universitas Tridinanti.
- Febriyanti, I. (2013). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan).
- Firdayani, Dkk. 2017. *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 12(1) : 24-38.
- Ida, I., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II-Tangerang). *eCo-Fin*, 3(2), 213-228.
- Jannata R A, Nurhayati N, dan Halimatusadiah E. Maret 2019. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey Pada*

Seluruh Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang). Kajian Akuntansi 20(1) : 58-64. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung.

- Komalasari, E., Yanti, Y., & Trisyanto, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(24), 294-305.
- Luviana FL. 2022. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak Kpp Pratama Demak*. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Marani, O., Simanjuntak, A., & Seralurin, Y. C. (2020). Dampak Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 1(1), 23-32.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Prano, R. (2017). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
- Ramadhan, F., Firdaus, N. Y., Indrayani, I., & Wahyuni, E. S. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara). *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(3).
- Riantini, K., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(5), 1399-1416.
- Roujani G J, Kalangi L, Pinatik S. Januari 2020. *Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak*

- dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. [Indonesia Accounting Journal](#) 2(2) : 66. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.*
- Roujani, G. J., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2020). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 66-73.
- Sanjaya, A. W. (2022). Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp), Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (*Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega*) (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Syafira S. 2020. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Teri, T. T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19-31.
- Wahyuni W, Anam H. 2019. *Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Manajemen dan Bisnis 8(1) :1365. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan.
- Wijayanto A. 2012. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Yantri O, 2022. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Selatan)*. Fakultas Ekonomi Universitas Batam. Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi Vol. 12 No. 2.